

ABSTRAK

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor disini dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya Pemerintah Daerah Provinsi diberikan kewenangan untuk memungut Pajak Provinsi melalui setiap daerahnya masing-masing sesuai dengan Provinsi. Tetapi pelaksanaan dilapangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjelaskan bahwasanya Pajak Kendaraan Bermotor hasil dari pembagian antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus digunakan sebagai prasarana perbaikan jalan yang rusak. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peraturan apa saja yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan menganalisis kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bangkalan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa peraturan Pajak Kendaraan Bermotor telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi pelaksanaan yang belum tercapai dengan maksimal sehingga masih banyak jalan atau prasarana lainya yang berkaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor. Dan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan banyaknya animo masyarakat Kabupaten Bangkalan terhadap Kendaraan Bermotor.

Kata kunci : Pajak Kendaraan Bermotor - kontribusi

ABSTRACT

Motorized Vehicle Tax is a tax on ownership and/or control of motorized vehicles. Motorized Vehicle Tax here is collected based on Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Taxes and Regional Retribution which are then given by the Provincial Government the authority to collect Provincial Taxes through each region in accordance with the Province. But the implementation in the field that is not in accordance with the laws and regulations which explains that the Motor Vehicle Tax resulting from the division between the Provincial Government and the Regency / City Government must be used as a damaged road repair infrastructure. Therefore, this study was conducted to analyze any regulations that are in accordance with the laws and regulations concerning Motor Vehicle Taxes and analyze the contribution of Motor Vehicle Taxes to the Original Budget Revenue in Bangkalan Regency.

The research method that is used in this study is normative legal research. While a legislative itself is also used by the writer as the approach.

The results of this study indicate that the Motor Vehicle Tax regulations are in accordance with the laws and regulations that apply but the implementations has not been reached optimally so that there are still many other roads or infrastructure related to Motor Vehicle Taxes. And the contribution of Motor Vehicle Taxes is very influential on Regional Original Revenue with the high interest of the people of Bangkalan Regency toward Motorized Vehicles.

Keywords : Motor Vehicle Tax - Contribution

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penulisan.....	7
1.4 Kegunaan	7
1.5 Keaslian	8
1.6 Metode Penelitian.	10
1.6.1 Jenis Penelitian.....	10
1.6.2 Metode Pendekatan	10
1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum	12
BAB II PAJAK DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.....	13
2.1 Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.....	13
2.1.1 Pengertian Pajak.....	13
2.1.2 Pengertian Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah	20
2.1.3 Penerapan dan Peraturan Tentang Pajak Daerah.....	24
2.2 Pajak Kendaraan Bermotor	27
2.2.1 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor	27
2.2.2 Dasar Pengenaan dan Cara Perhitungan PKB.....	30
2.3 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	33
BAB III PERATURAN DAN KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	39
3.1 Peraturan Pajak Kendaraan Bermotor.....	39

3.2 Analisis dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor	43
3.2.1 Kontribusi PKB terhadap PAD Jawa Timur	43
3.2.2 Kontribusi PKB terhadap PAD Bangkalan.....	48
BAB IV PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
BIODATA PENULIS	